* 1. **Menurut Leonard D. White (1965:75)** memberikan definisi sebagai berikut :

**“*Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or millitary, large scale or small scale etc.*”) (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya).**

1. **H.A. Simon, (1992:2)** memberikan definisi sebagai berikut : “*Administration as the activies of groups cooperating to accomplish common goals*”.) (Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama).
2. **William H. Newman, (1963:3)** mengemukakan : (“*Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards gome common goal*.”) (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu individu terhadap tercapainya tujuan bersama).

Beberapa definisi administrasi, maka **Handayaningrat (1981:3)** mengemukakan ciri - ciri administrasi tersebut dapat digolongkan atas :

* 1. **Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih,**
  2. **Adanya kerjasama dari kelompok tersebut,**
  3. **Adanya kegiatan/proses/usaha,**
  4. **Adanya tujuan.**

**2. Dimensi – Dimensi Ilmu Administrasi**

Ada beberapa domain dalam studi yang menjadi objek telaahan dalam lingkup administrasi. Mengikuti konsepsi dari Balai Pembinaan Administrasi (BPA), **Miftah Toha (1983)** yang dikutip oleh **Silalahi (2005 : 92)**, mengemukakan adanya delapan unsur adminsitrasi, yaitu:

1. **Organisasi**
2. **Manajemen**
3. **Komuniksi**
4. **Kepegawaian**
5. **Keuangan**
6. **Perbekalan**
7. **Tatausaha**
8. **Perwakilan atau Hubungan Masyarakat**

Selain itu, terdapat juga dimensi katakteristik yang dikemukakan oleh **Pasolong (2014 : 3)**

1. **Efisien berarti bahwa tujuan (motive) dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa pencapaian tujuan adminstrasi dengan hasil yang berdaya berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien).**
2. **Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain.**
3. **Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar atau disengaja.**

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan serja sehinga tercapai tujuan secara “efektif” dan “efisien” melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistik dan benar – benar tepat, logis dan dapat dikerjakan.

**Siagian (1978)** yang dikutip oleh **Silalahi (2005 : 92)** juga menyebutkan adanya enam dimensi dalam membicarakan administrasi. Bidang –bidang tersebut adalah:

1. **Filsafat Administrasi**
2. **Kepemimpinan (*Leadership)***
3. **Hubungan Manusia (*Human Relation)***
4. **Organisasi**
5. **Administrasi Negara**
6. **Administrasi Niaga**

Salah satu dimensi yang disebutkan diatas yaitu Administrasi Negara yang selanjutnya akan dibahas oleh peneliti karena administrasi Negara sangat menunjang untuk tercapainya suatu organisasi.

**3. Pengertian Administrasi Negara**

Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari “*Public Administrations”****.*** Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. jika istilah Public Administration itu di uraikan secara etimologis, maka *“Public”* berasal dari bahasa Latin *“Poplicus”*yang semula dari kata *“Populus”*atau *“People”* dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. *“Administration”*juga berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata *“ad”* artinya intensif dan *“ministrare”* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

**Pffifner dan Presthus** yang dikutip **syafei (2003:31)** memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

1. **Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.**
2. **Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.**
3. **Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumah orang.**

Administrasi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu administrasi seperti yang dikemukakan **Admosudirdjo (1990 : 9)** yaitu:

**Administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern daripada struktur – struktur dan proses – proses yang terdapat di dalam bagian sangat penting daripada Sistem dan Aparatur Pemerintahan, yang secara disingkat disebut Administrasi Negara, yang dalam bahasa Inggris Amerika disebut *Public Administration*, dan dalam bahasa Belanda *Openbaar Bestuur.***

Berbeda dengan pendapat diatas, **Gordon** yang dikutip **Syafiie**  (**2013 : 33)** mengemukakan definisi Administrasi Negara, yaitu:

**Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh bada legislatif, eksekutif, serta peradilan.**

Dilihat dari pengertian diatas bahwa administrasi negara dirumuskan sebagai proses yang diakukan atau perseorangan sesuai dengan peraturan yang ada.

Konsep administrasi negara juga menerangkan bahwa administrasi negara seagai suatu “proses” yaitu meliputi semua langkah yang diambil diantara saat suatu badan pelaksanaan menerima kewenangan mengambil keputusan sampai tercapai suatu tujuan seperti definisi administrasi negara menurut **Pamudji (1993 : 31)**  yaitu **“sebagai suatu proses, administrasi negara akan meliputi seluruh kegiatan gerak – gerik manusia saat menentukan tujuan apa yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan itu.”**

Mencermati pendapat ahli tersebut, pada dasarnya administrasi maupun adminitrasi negara memiliki kesamaan, apabila administrasi lebih cenderung kepada hal yang bersifat umum, sedangkan administrasi negara lebih kepada kenegaraan. Sehingga dapat disimpulkan hbahwa administrasi negara penting dipelajari untuk memahami pentingnya kegiatan administrasi.

* 1. Ruang Lingkup Adminitrasi Negara

**Henry (1995)** yang dikutip oleh **Pasolong (2014 : 19)** memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi Publik yang dapat dilihat dari topik – topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1. **Organisasi publik, pada prinsip nya berkenaan dengan model – model organisasi dan perilaku birokrasi.**
2. **Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggara publik, dan manajemen sumber daya manusia, dan**
3. **Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.**

Selain itu **Dimock (1992 : 26)**  yang dikutip oleh **Pasolong (2014 : 20)** membagi empat komponen administrasi negara, yaitu

1. **Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan – tindakan politis, dasar – dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan – tujuan, kebijakan – kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana – rencana.**
2. **Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha – usahanya: struktur administrasi dari segi formal nya.**
3. **Bagaimana para administrator mewujudkan kerja sama (*teamwowk)*. Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian – bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.**
4. **Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab: baik mengenai pengawasan dalan badan –badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan – badan perwakilan rakyat, badan – badan yudikatif, dan badan – badan lainnya.**

Dari keempat komponen tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari lembaga – lembaga.

1. **Konsep *Good Governance***

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan adminitrasi publik dewassa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaanperbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2012:4), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah

**“Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembagalembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

* + - 1. **Prinsip – Prinsip *Good Governance***

Kunci utama untuk memahami kepemerintahan yang baik *(good governance)* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen good governance tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)* adalah, sebagai berikut :

* + - * 1. Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

* + - * 1. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan prundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang atuaran hukum dan hak azasi manusia.

* + - * 1. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

* + - * 1. Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

* + - * 1. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kpentingan ang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapakan pemerintah.

* + - * 1. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar seusai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaikbaiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

* + - * 1. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

* + - * 1. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsipprinsip utama yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2012:289).

* 1. Pengertian Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam

Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Transparancy International, undang-undang Fredom of Information (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina (2003: 19).

* 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan

pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.Akuntabilitas merujuk pada

pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya

kepada pemilik (stakeholder).Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan

upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang

transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

* + - 1. **Tujuan *Good Governance***

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan public secara seimbang sehingga semua pihak bisa merasakan kepuasan dalam pelayanan pemerintah yang ada.

Thoha (2000 : 7) menyatakan **“ Bahwa salah satu wujud tata kepemrintahan yang baik good governance adalah terdapatnya citra pemerintah yang demokratis.”**

Sedangkan Hadiyansyah ( 2011: 105 ) mengemukakan bahwa tujuan good governance sebagai berikut :

**“Tujuan pokok good governance adalah tercapaianya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan public secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta).”**

Dengan adanya tata pemerintahan semua pihak harus saling mengetahui yang dilakukan oleh pihak lainnya,serta membuka ruang dialog agar para phak saling memahami perbedaan – perbedaan di antara mereka. Melalui poses tersebut diharapkan sinergi dalam penerapan progam – program pemerintahan yang baik di masyarakat.

Dalam pelayanan selain responsivitas, pihak pemerintah maupun masyarakat mempunyai peran yang sama – sama penting, sehingga kedua belah pihak sama – sama penting, sehingga kedua belah pihak sama - sama diuntungkan, sehingga tujuan pokok *good governance* tercapai.

1. **Konsep Efektivitas Kerja**

Sebelum peneliti kemukakan pengertian efektivitas kerja terlebih dahulu peneliti menguraikan pengertian efektivitas dan kerja terlebih dahulu kemudian mengemukakan pengertian tentang pengertian efektivitas kerja dari para ahli.

Definisi dari efektivitas menurut **Emerson (dalam Handayaningrat,1994:16),** yaitu :” *Efectiveness is meanisuring in term of attaining prescribed goals or objective “*(efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).

Berbeda dengan pendapat **Liang Gie (1991:197),** bahwa :

**Efektif itu adalah suatu program tertentu dapat dicapai tepat sesuai dengan rencana, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tata kerja yang telah ditentukan, sumber manajemen telah tersedia dengan lengkap dan tepat sesuai kebutuhan untuk pencapaian tujuan, berbagai sumber manajemen dapat digunakan secara tepat, serta pencapaian tujuan organisasi sesuai rencana yang telah ditentukan.**

Demikian pula **Handayaningrat (1994:16),** adalah :

**Suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.**

Sedangkan **Siagian (2001:24),** bahwa :

**Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.**

Selanjutnya **Komarudin (1984:39)** menyebutkan, bahwa efektif itu adalah :

**Suatu keadaan menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum). Dengan perkataan lain, manajemen yang efektif tidak perlu disertai manajemen yang efisien. Tercapainya tujuan, mungkin dapat dilakukan dengan pembaharuan, karena keberhasilan manajemen tidak boleh hanya diukur oleh efektivitas, tetapi pula diperlukan efisiensi.**

**Hasibuan (2003:105)**, mengatakan bahwa:

**efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Supaya dapat menjamin suatu keberhasilan usaha dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam suatu organisasi perlunya pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat menimbulkan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu dan peningkatan sumberdaya manusia.**

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu

Peneliti akan kemukakan pengertian kerja **Gie (1995:73)** adalah sebagai berikut:

**“Kerja adalah keseluruhan aktivitas-aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atu mengandung maksud tertentu terutama yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya.”**

Berdasarkan pengertian efektivitas serta kerja menurut para ahli diatas maka untuk lebih jelasnya peneliti kemukakan pengertian efektivitas kerja, menurut **Siagian** **(1999:151)** sebagai berikut:

**“Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah di tetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu di selesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakanya dan berapa biaya yang di keluarkan untuk itu.”**

Sedangkan dalam penetapan pekerja yang di lakukan oleh pegawai dalam meningkatkan efektivitas menurut **Siagian** **(1999:151)** adalah sebagai berikut:

1. **Standar waktu yang telah ditentukan**
2. **Hasil pekerjaan yang dicapai**
3. **Biaya pengeluaran sesuai dengan rencana**
4. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah : **“Ada Hubungan antara Good Governance dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Bagian Sekretariat Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.”**

Hipotesis diatas adalah hipotesis penelitian yang sifatnya verbal dan subtantif artinya belum bisa diuji oleh karena itu harus diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik yang sudah operasional sebagai beikut :

1. H0 s = 0, artinya tidak adanya hubungan antara *Good Governance* (X) dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Y).
2. H1 ≠ 0, artinya ada hubungan antara *Good Governance* (X) dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Y).
3. Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian :

**X**

**Y**

**GAMBAR 2.1**

**Paradigma Penelitian *Good Governance* dengan Efektivitas Kerja**

**Keterangan gambar :**

X = Variabel Good Governance

Y = Variabel Efektivitas Kerja Pegawai

1. **Hubungan *Good Governance* dengan Efektivitas Kerja Pegawai**

Organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik *Good Governance*. Perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaanya adalah pendayahgunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sebagai salah satu unsur organisasi, memeganng peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan organisaasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur – unsur lain. Sehingga dalam organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan *Good Governance*.